



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
NOMOR 1024/PID.SUS/2018/PN.BLB
TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA**

SKRIPSI



oleh
Sri Adjti Laras Ati
21801021156

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

LEGAL ANALYSIS OF BALE BANDUNG DISTRICT COURT DECISION NUMBER 1024/PID.SUS/2018/PN.BLB REGARDING WEAPON OWNERSHIP

Sri Adji Laras Ati

Faculty of Law, Islamic University of Malang

This thesis raises the topic related to the case of weapons ownership involving Epul Saepuloh alias Andri Bin Asep, a resident of Bandung, culminating in an incident on October 11, 2018. Epul, who felt betrayed by witness Jajang, brought a machete and looked for Jajang at his house and then at the pengajian. After verbal confrontation, Epul was detained by witnesses and handed over to the police. This incident was recorded in a court decision with the number 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb . This study aims to understand the legal aspects of the decision, with a focus on the application of article 2 Paragraph (2) of Emergency Law No. 12 of 1951.

In this study, the method applied is the analysis of statutory regulations. Legal research using statutory regulation analysis is not only limited to the study of written legal texts, but also explores the practical implications of the law in its application in society. Thus, researchers can understand the dynamics between the law on paper and the social reality that occurs. This is important to ensure that legal interpretation is not only theoretical, but also applicable and relevant to the needs and developments of the times. Through a case approach, this study seeks to provide a comparative analysis between existing cases and the current legal situation, so that it can provide concrete and evidence-based recommendations for improving legal policies and practices in the future. Thus, this study contributes to the development of laws that are more dynamic and responsive to emerging social challenges.

The results of the study revealed that the judge's decision in applying the law is not only based on the evidence and facts available, but also on in-depth consideration of the social impact and the defendant's potential for self-improvement. By considering the aggravating and mitigating factors, the judge tries to reach a fair and balanced decision, which not only provides an appropriate sentence but also provides an opportunity for the defendant to improve himself and return to society as a responsible individual. This restorative justice approach shows an evolution in the justice system that emphasizes more on the humanistic and rehabilitative aspects, where the main goal is to restore disturbed social relationships and promote social harmony, in line with the values of justice and humanity.

Research on the decision of the Bale Bandung District Court recorded in the court decision number 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb shows that possession of a weapon without a permit is a serious violation of the law with criminal consequences. The judge emphasized the importance of the link between possession of a weapon and a person's job and the social impact of the act. This

decision also underlines the need for regulatory improvements to improve public safety, as well as implementing the principle of restorative justice by considering the defendant's intentions and behavior in giving a sentence.

Keywords: *Legal Analysis, Weapon Ownership.*



RINGKASAN**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
NOMOR 1024/PID.SUS/2018/PN.BLB TENTANG KEPEMILIKAN
SENJATA**

Sri Adji Laras Ati

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat topik terkait kasus kepemilikan senjata yang melibatkan Epul Saepuloh alias Andri Bin Asep, warga Bandung, berujung pada insiden pada 11 Oktober 2018. Epul, yang merasa dikhianati oleh saksi Jajang, membawa golok dan mencari Jajang di rumahnya dan kemudian di pengajian. Setelah konfrontasi verbal, Epul ditahan oleh saksi-saksi dan diserahkan ke polisi. Peristiwa ini tercatat dalam putusan pengadilan dengan nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb. Penelitian ini bertujuan untuk memahami aspek yuridis dari keputusan tersebut, dengan fokus pada penerapan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Dalam penelitian ini, metode yang diaplikasikan adalah analisis peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan ini tidak hanya terbatas pada pengkajian teks hukum yang tertulis, tetapi juga mengeksplorasi implikasi praktis dari undang-undang tersebut dalam penerapannya di masyarakat. Dengan demikian, peneliti dapat memahami dinamika antara hukum yang ada di atas kertas dengan realitas sosial yang terjadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa interpretasi hukum tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Melalui pendekatan kasus, penelitian ini berusaha memberikan analisis komparatif antara kasus-kasus yang telah ada dengan situasi hukum terkini, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan dan praktek hukum di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih dinamis dan responsif terhadap tantangan sosial yang muncul.

Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa keputusan hakim dalam menerapkan hukum tidak hanya didasarkan pada bukti dan fakta yang ada, tetapi juga pada pertimbangan yang mendalam mengenai dampak sosial dan kemungkinan perbaikan diri terdakwa. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, hakim berusaha mencapai keputusan yang adil dan seimbang, yang tidak hanya memberikan hukuman yang sesuai tetapi juga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Pendekatan keadilan restoratif ini menunjukkan evolusi dalam sistem peradilan yang lebih menekankan pada aspek humanis dan rehabilitatif, di mana tujuan utamanya adalah untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu dan mempromosikan harmoni sosial, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang tercatat dalam putusan pengadilan dengan nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb menunjukkan bahwa kepemilikan senjata tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang serius dengan konsekuensi pidana. Hakim menekankan pentingnya

kaitan antara kepemilikan senjata dengan pekerjaan seseorang dan dampak sosial dari tindakan tersebut. Putusan ini juga menggarisbawahi perlunya perbaikan regulasi untuk meningkatkan keselamatan publik, serta menerapkan prinsip keadilan restoratif dengan mempertimbangkan niat dan perilaku terdakwa dalam memberikan vonis.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Kepemilikan Senjata.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hubungan antara masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan. Hukum berfungsi untuk mengatur dan memberi batasan pada tingkah laku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, hukum juga berperan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan secara umum tindak pidana ialah suatu tindakan yang dilarang dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan dan juga bersifat melawan hukum serta didalamnya mengandung beberapa unsur kesalahan atau bisa dikatakan juga ialah perbuatan orang atau korporasi yang melakukan pelanggaran hukum.¹

Pada umumnya delik – delik yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) ditunjukkan pada subjek hukum “orang” sedangkan dalam pasal 340 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) subjek deliknya adalah “Barangsiapa”. Bisa disimpulkan bahwa kata barangsiapa hanya ditunjukkan kepada satu orang atau hanya satu orang dan setiap perbuatan kejahatan juga bisa dilakukan lebih dari satu orang dan dimana di dalam sebuah ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih dan setiap orang melakukan wujud-wujud

¹. Fikri Fawaid, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No, 774 K/Pid.Sus/2015 dan 314 K/ Pid/ 2015, (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)*, 1

perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Salah satu contoh tindak pidana yang saat ini masih terjadi ialah tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Di Indonesia, kepemilikan senjata tajam diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pasal ini menjelaskan bahwa siapa saja yang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, menguasai, membawa, atau menyimpan senjata tajam dapat dikenakan hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Senjata tajam yang dimaksud termasuk senjata pemukul, penikam, atau penusuk. Aturan ini bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan yang melibatkan senjata tajam dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya.

Salah satu sebab utama timbulnya pelanggaran terhadap kepemilikan senjata tajam adalah ancaman dan pengancaman. Dalam situasi di mana seseorang merasa terancam atau diancam, mereka mungkin merasa perlu untuk memiliki senjata tajam sebagai bentuk perlindungan diri. Ancaman ini bisa datang dari berbagai sumber, seperti konflik pribadi, lingkungan yang tidak aman, atau bahkan tekanan dari kelompok tertentu. Ketika seseorang merasa bahwa keselamatan mereka atau orang yang mereka cintai berada dalam bahaya, mereka mungkin melihat kepemilikan senjata tajam sebagai solusi cepat untuk mengatasi rasa takut dan ketidakamanan. Namun, tindakan ini sering kali berujung pada pelanggaran hukum, karena banyak yurisdiksi memiliki peraturan ketat mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata tajam. Selain itu, kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang sah dapat meningkatkan risiko kekerasan dan eskalasi konflik, yang pada akhirnya merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Penggunaan senjata tajam untuk mengancam seseorang merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan ilegal. Ketika seseorang menggunakan senjata tajam untuk mengancam, mereka menciptakan situasi yang penuh ketegangan dan ketakutan, yang dapat dengan cepat berubah menjadi kekerasan fisik. Ancaman dengan senjata tajam sering kali digunakan untuk memaksa korban melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku, seperti menyerahkan barang berharga, uang, atau bahkan melakukan tindakan tertentu di bawah tekanan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban. Selain itu, penggunaan senjata tajam untuk mengancam dapat memperburuk situasi konflik dan meningkatkan risiko cedera serius atau kematian.

Salah satu kasus terkait kepemilikan senjata dijelaskan di dalam putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb, seorang terdakwa yang bernama Epul Saepuloh alias Andri Bin Asep berusia 21 tahun, lahir di Bandung pada tahun 1997, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kp.Biru, RT/RW.02/03, Desa Mandalasari, Kec. Cikancung, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat, beragama Islam, dan pekerjaan terakhir sebagai buruh. Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB, berawal karena terdakwa merasa sakit hati oleh saksi Jajang yang melaporkan ke Ketua RW karena Terdakwa berisik minum-minuman keras sampai tengah malam, sedangkan ada tetangga saksi Jajang, yaitu Dede berisik sedang membangun tidak dilaporkan ke Ketua RW, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Jajang sambil membawa 1 (satu) buah golok tanpa sarung sepanjang 30 cm bergagang kayu warna biru dibawa dengan tangan kanan ditutupi dengan

baju, lalu mengetuk pintu rumah saksi Jajang, namun yang keluar istrinya dan Terdakwa berkata "mana Jajang" istrinya mengatakan bahwa saksi Jajang sedang tidak ada dirumah sedang ada pengajian dirumah saksi Nanang. Lalu Terdakwa pergi kerumah saksi Nanang untuk mendatangi saksi Jajang, Ketika ada dirumah saksi Nanang kebetulan ada pengajian, lalu Terdakwa mengetuk pintu dan keluar saksi Jajang sambil dirangkul keluar saksi Jajang oleh Terdakwa dibawa keluar, sesampai diluar saksi Jajang bertanya ada apa?. Ketika saksi Jajang memegang tangan kanan Terdakwa yang ternyata ada sebuah golok, lalu saksi Jajang mundur dan bertanya "untuk apa itu golok?. "Untuk membunuh kamu" kata Terdakwa, lalu terjadi cekcok dan datang saksi Nanang dan saksi Iip dari rumah dan saksi Iip memegang badan Terdakwa dan datang saksi Ade Purnama mengambil golok yang ada di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya mengamankan Terdakwa, dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Cikancung beserta golok untuk diproses lebih lanjut.²

Menurut fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Epul Saepuloh alias Andri Bin Asep melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membawa dan atau menguasai, memiliki senjata tajam tanpa haka tau
ijin

² Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Bib

3. Senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan profesi / pekerjaan

Sedangkan menurut pertimbangan Hakim Terdakwa Epul Saepuloh alias Andri Bin Asep tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Berdasarkan uraian diatas, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 1024/PID.SUS/2018/PN.BLB TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap kasus kepemilikan senjata dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus kepemilikan senjata dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap kasus kepemilikan senjata dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb.
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus kepemilikan senjata dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pidana, khususnya terkait dengan regulasi dan penegakan hukum mengenai kepemilikan senjata api.
- b. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem peradilan pidana yang ada, sehingga dapat menjadi dasar untuk rekomendasi perbaikan kebijakan hukum.
- c. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan, yang dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami dinamika peradilan pidana di Indonesia.

2. Secara Praktis:

a) Bagi Mahasiswa.

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang proses hukum dan penerapan hukum pidana di Indonesia. Sehingga mahasiswa dapat belajar bagaimana menganalisis putusan pengadilan secara kritis dan memahami implikasi hukum dari kepemilikan senjata ilegal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam penulisan skripsi atau tugas akhir yang berkaitan dengan hukum pidana.

b) Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum kepemilikan senjata dan konsekuensi hukumnya. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya mematuhi hukum dan menghindari tindakan yang melanggar hukum. Penelitian ini juga dapat membantu masyarakat memahami proses peradilan dan hak-hak mereka dalam sistem hukum.

c) Bagi Institusi

Bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan kurikulum di bidang hukum. Institusi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan ajar untuk memperkaya materi perkuliahan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu institusi dalam mengembangkan program-program pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan hukum pidana dan kepemilikan senjata.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dari penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, perbedaan, dan kontribusi, jika dibandingkan dengan penelitian penulis, yaitu:

Skripsi yang pertama, berjudul Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks.) yang disusun oleh Andi Faisal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang disusun memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada fokus analisis yuridis terhadap kasus kepemilikan senjata tanpa hak. Keduanya mengeksplorasi implikasi hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus serupa, mengacu pada peraturan yang berlaku. Perbedaannya, penelitian pertama berfokus pada studi kasus Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks yang spesifik terhadap kepemilikan senjata tajam, sementara penelitian kedua berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang melibatkan senjata dengan jenis dan latar belakang masalah yang berbeda. Kebaruan yang bisa dihasilkan melalui penelitian ini

meliputi perbandingan analisis kasus yang berbeda, peninjauan kembali aspek-aspek hukum yang terlibat, dan identifikasi tren dan perubahan dalam penerapan hukum. Penelitian saat ini lebih kepada eksplorasi perbedaan dalam pertimbangan hakim, dampak sosial dari keputusan tersebut, atau implikasi hukum yang lebih luas dari putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang praktik hukum dan kebijakan publik terkait kepemilikan senjata tajam.

Skripsi yang kedua berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Serta Kepemilikan Senjata Api Oleh Warga Sipil (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus/2020/Pn Jap), disusun oleh Timbul Lias Ate Munthe, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang disusun memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Persamaannya, kedua penelitian berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi dan penegakan hukum terkait kepemilikan senjata api oleh warga sipil di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada fokus dan konteks putusan pengadilan yang ditinjau. Penelitian terdahulu berfokus pada analisis kasus spesifik di Pengadilan Negeri Jayapura dan mengeksplorasi aspek hukum terkait kepemilikan senjata api oleh warga sipil dalam konteks hukum Indonesia. Sementara itu, penelitian saat ini fokus mengkaji putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung terkait kepemilikan senjata tajam. Dalam konteks penelitian hukum, kebaruan ini dapat dilihat melalui perbandingan mendalam antara kasus-kasus yang berbeda untuk mengidentifikasi tren, perubahan dalam penerapan hukum, atau perbedaan dalam pertimbangan yudisial. Misalnya, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bale

Bandung Nomor 1024/PID.SUS/2018/PN.BLB, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana pertimbangan hakim telah berkembang sejak studi kasus sebelumnya pada tahun 2020. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam sanksi, interpretasi hukum, atau bahkan pendekatan terhadap bukti dan kesaksian. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai dinamika hukum pidana dan pengaruhnya terhadap kebijakan publik terkait kepemilikan senjata api oleh warga sipil.

Skripsi yang ketiga, berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks), disusun oleh Hardianti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah penggunaan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Sementara perbedaannya terletak pada objek kajian yang dibahas. Dimana penelitian terdahulu menggunakan metode hukum normatif dengan data sekunder dari putusan pengadilan dan undang-undang, serta wawancara dengan hakim dan jaksa. Kebaruan yang bisa dihasilkan dari penelitian saat ini adalah dengan membandingkan aspek-aspek hukum dan penerapan sanksi dalam kasus kepemilikan senjata tajam tanpa hak oleh anak antara putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Analisis komparatif ini dapat mengungkap perbedaan dalam interpretasi hukum dan kebijakan pemidanaan, serta memberikan wawasan tentang evolusi praktik peradilan dalam kasus serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak dan kontribusi pada literatur hukum yang ada.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh
tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni :



Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian

No	PROFIL	JUDUL
1.	Andi Faisal Skripsi Universitas Bosowa	Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks.)
	ISU HUKUM	
	1. Apakah unsur tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa hak menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terbukti dalam putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks? 2. Apakah pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. sudah sesuai dengan upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak di kota Makassar?	
	HASIL PENELITIAN	
	Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa unsur tindak pidana pada putusan No. 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. telah sesuai dengan unsur tindak pidana dan memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur dari UU Darurat No. 12 Tahun 1951 No. 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang dianggap sehat, tidak memiliki gangguan pada mental dianggap mampu memepertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yakni 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan dan membayar sejumlah biaya perkara.	

	PERSAMAAN	Pertama, penelitian terdahulu dan saat ini berfokus pada analisis hukum terkait kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Kedua, penelitian ini sama-sama mengkaji putusan pengadilan yang spesifik, menunjukkan studi kasus yang mendalam dalam konteks hukum Indonesia. Ketiga, kedua penelitian sama-sama mengeksplorasi implikasi hukum dari kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang sah. Keempat, kedua penelitian bertujuan untuk memahami dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.
	PERBEDAAN	Pertama, terdapat perbedaan focus analisis. Dimana penelitian terdahulu berfokus pada analisis hukum terhadap kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Kedua, terdapat perbedaan pada kasus hukum yang dibahas. Dimana penelitian terdahulu mengkaji studi kasus putusan nomor 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks dan penelitian saat ini mengkaji putusan

		pengadilan nomor 1024/PID.SUS/2018/PN.BLB. Ketiga, terdapat perbedaan lokasi pengadilan. Dimana penelitian terdahulu berkaitan dengan pengadilan di Makassar. Sementara penelitian saat ini berkaitan dengan pengadilan di Bale Bandung.
	KONTRIBUSI	Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami perbedaan dalam pertimbangan hakim, dampak sosial dari keputusan tersebut, atau implikasi hukum yang lebih luas dari putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang praktik hukum dan kebijakan publik terkait kepemilikan senjata tajam.
2.	PROFIL	JUDUL
	Timbul Lias Ate Munthe Skripsi Universitas Sumatera Utara	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Serta Kepemilikan Senjata Api Oleh Warga Sipil (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus/2020/Pn Jap)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana penerapan regulasi hukum mengenai kepemilikan senjata api oleh warga sipil di Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus	

	penguasaan dan kepemilikan senjata api oleh warga sipil?
	HASIL PENELITIAN
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga sipil juga dapat dikenakan sanksi pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP, apabila telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 45/Pid.Sus/2020/PN Jap. Dalam putusan tersebut, seorang warga sipil dinyatakan dan dipidana karena melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api.
	PERSAMAAN Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki persamaan yang menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama mengkaji aspek hukum pidana dalam konteks kepemilikan senjata api. Keduanya bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Kedua penelitian juga sama-sama mengimplikasikan adanya peristiwa atau kasus yang menjadi titik tolak penelitian,

		yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan senjata api.
	PERBEDAAN	Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki perbedaan terhadap putusan yang dianalisis. Penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang melibatkan penguasaan dan kepemilikan senjata api oleh warga sipil, dengan studi kasus spesifik pada putusan nomor 45/Pid.Sus/2020 dari Pengadilan Negeri Jayapura. Sementara penelitian saat ini berfokus pada putusan pengadilan yang berkaitan dengan kepemilikan senjata, dengan fokus pada putusan nomor 1024/PID.SUS/2018 dari Pengadilan Negeri Bale Bandung.

	KONTRIBUSI	Penelitian saat ini dapat memberikan kontribusi baru dalam mengeksplorasi bagaimana pertimbangan hakim telah berkembang sejak studi kasus sebelumnya pada tahun 2020. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam sanksi, interpretasi hukum, atau bahkan pendekatan terhadap bukti dan kesaksian. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai dinamika hukum pidana dan pengaruhnya terhadap kebijakan publik terkait kepemilikan senjata api oleh warga sipil.
3.	PROFIL	JUDUL
	Hardianti Skripsi Universitas Bosowa	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh Anak? 10 2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana	

	No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. sudah sesuai dengan aspek pemedanaan anak?	
	HASIL PENELITIAN	
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam oleh Anak telah tepat, karena Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum) telah memenuhi kesemua unsur pelanggaran. Melihat kesemua unsur tersebut terpenuhi maka tidak ada upaya bagi Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum) untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana yang didakwakan kepadanya. Begitupun sebaliknya, dari sisi Jaksa Penuntut Umum, tidak dimungkinkan dilakukannya SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Namun seharusnya Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dengan mempertimbangkan usia anak dari Akbar Bin Rudi. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan dalam Putusan Perkara Pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam LPKA Maros bagi Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum).	
	PERSAMAAN	Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah penggunaan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian terdahulu dan saat ini focus yang dimiliki juga sama yaitu terkait tindak pidana kepemilikan senjata dengan objek

		penelitian keduanya adalah putusan pengadilan yang spesifik, dengan nomor perkara yang jelas tercantum. Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini juga sama-sama mengevaluasi penerapan undang-undang dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.
	PERBEDAAN	Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini memiliki perbedaan yang terletak pada focus kasus. Dimana penelitian terdahulu berfokus pada tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak oleh anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar. Sementara penelitian saat ini berfokus pada kepemilikan senjata secara umum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Perbedaan juga terletak pada subjek hukum. Dimana penelitian terdahulu secara spesifik membahas kasus yang melibatkan anak sebagai subjek hukum. Sementara penelitian saat ini melibatkan orang dewasa sebagai subjek hukum.

	KONTRIBUSI	Kontribusi yang bisa dihasilkan dari penelitian saat ini adalah memberikan wawasan tentang evolusi praktik peradilan dalam kasus serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak dan kontribusi pada literatur hukum yang ada.
--	-------------------	--

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
SRI ADJI LARAS ATI	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
SKRIPSI	NEGERI BALE BANDUNG
UNIVERSITAS ISLAM	NO.1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb TENTANG
MALANG	KEPEMILIKAN SENJATA
ISU HUKUM	
1. Bagaimana analisis yuridis terhadap kasus kepemilikan senjata dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb?	
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus kepemilikan senjata dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb?	
NILAI KEBARUAN	
1. Menghasilkan perbandingan analisis kasus yang berbeda, peninjauan kembali aspek-aspek hukum yang terlibat, dan identifikasi tren dan	

perubahan dalam penerapan hukum. Penelitian saat ini lebih kepada eksplorasi perbedaan dalam pertimbangan hakim, dampak sosial dari keputusan tersebut, atau implikasi hukum yang lebih luas dari putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang praktik hukum dan kebijakan publik terkait kepemilikan senjata tajam.

2. Terdapat perbandingan mendalam antara kasus-kasus yang berbeda untuk mengidentifikasi tren, perubahan dalam penerapan hukum, atau perbedaan dalam pertimbangan yudisial. Misalnya, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/PID.SUS/2018/PN.BLB, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana pertimbangan hakim telah berkembang sejak studi kasus sebelumnya pada tahun 2020.
3. Kebaruan yang bisa dihasilkan dari penelitian saat ini adalah dengan membandingkan aspek-aspek hukum dan penerapan sanksi dalam kasus kepemilikan senjata tajam tanpa hak oleh anak antara putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Analisis komparatif ini dapat mengungkap perbedaan dalam interpretasi hukum dan kebijakan pemidanaan, serta memberikan wawasan tentang evolusi praktik peradilan dalam kasus serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak dan kontribusi pada literatur hukum yang ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi kepustakaan (*Library Research*), seperti peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb. Penelitian yuridis normatif sendiri bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum yang ada³. Hal ini sejalan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum⁴.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya⁵. Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Untuk penelitian ini, pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah pendekatan undang-undang (*Statute approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), dan pendekatan kasus.

3. Sumber Bahan Hukum

³ Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009. h. 13-14

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014. h. 133

⁵ *Ibid*

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 sumber bahan hukum yaitu⁶:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer meliputi, Norma dasar Pancasila, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan dasar UUD 1945, dan Yurisprudensi. Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu:
 - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor.1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian atau karya ilmiah. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum pidana, skripsi, thesis, dan jurnal.

⁶ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2015. h. 102-104.

- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wikipedia, dan sumber dari internet yang lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, jadi sebagai penelitian normatif maka bahan hukum adalah studi kepustakaan seperti mempelajari dan menganalisa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan di dalam penelitian ini, serta Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan usaha untuk memecahkan masalah dengan mengukur dimensi suatu gejala dan menetapkan hubungan antara gejala yang di temukan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan penelitian ini mengacu pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor.1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb. Dalam analisis bahan hukum ini akan dijelaskan mengenai pasal-pasal yang telah dilanggar oleh pelaku dan bentuk gabungan tindak pidana di dalam putusan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun atas 4 sub bab pembahasan secara berurutan. Tujuan sistematika penulisan ini untuk menciptakan pembahasan

yang terstruktur dan memudahkan pemahaman atas temuan penelitian secara keseluruhan.

BAB I : PENDAHULUAN.

Di dalam bab ini di uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan juga sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pembahasan tinjauan pustaka atau kajian teori. Bab ini penulis menguraikan landasan teori yang akan menjadi referensi untuk membantu penulis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Di dalam bab ini berisi tentang memaparkan hasil penelitian penulis. Serta menjawab masalah-masalah yang terdapat di dalam rumusan masalah, yaitu : mengenai pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh terdakwa dan bentuk dari gabungan tindak pidana di dalam Putusan No 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.

Pada bab ini adalah membahas mengenai hasil penelitian yang berupa kesimpulan, pembahasan dan saran yang dapat di berikan dari hasil penelitian yang sudah di lakukan dan diharapkan dapat bermafaat bagi pihak yang berkepentingan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menyimpulkan poin-poin penting sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN.Blb menegaskan bahwa kepemilikan senjata tanpa izin adalah pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan prinsip delik formal. Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin, yang tidak terkait dengan pekerjaannya, sehingga menegaskan pelanggaran hukum yang jelas. Penelitian ini juga merekomendasikan perbaikan dalam regulasi dan penegakan hukum terkait kepemilikan senjata untuk meningkatkan keselamatan masyarakat.
2. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa terdakwa, Epul Saepuloh, membawa senjata tajam jenis golok tanpa izin, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Hakim memastikan bahwa semua unsur hukum yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan terdakwa terpenuhi, termasuk tindakan membawa dan menguasai senjata tanpa hak. Selain itu, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti dampak sosial dari tindakan terdakwa, serta faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap sopan dan penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa.

Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pendekatan yang seimbang dan adil, di mana hakim tidak hanya fokus pada pelanggaran hukum, tetapi juga mempertimbangkan niat dan perilaku terdakwa setelah peristiwa tersebut, sehingga menegakkan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan.

Kesimpulan ini menyoroti pentingnya regulasi dan penegakan hukum yang ketat terhadap kepemilikan senjata tanpa izin untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki mekanisme untuk menilai pelanggaran hukum secara menyeluruh dan adil, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk niat dan perilaku terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar terdapat peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai peraturan hukum terkait kepemilikan senjata, serta peninjauan berkala terhadap efektivitas peraturan tersebut untuk memastikan bahwa tujuan awal dari regulasi tersebut tercapai.

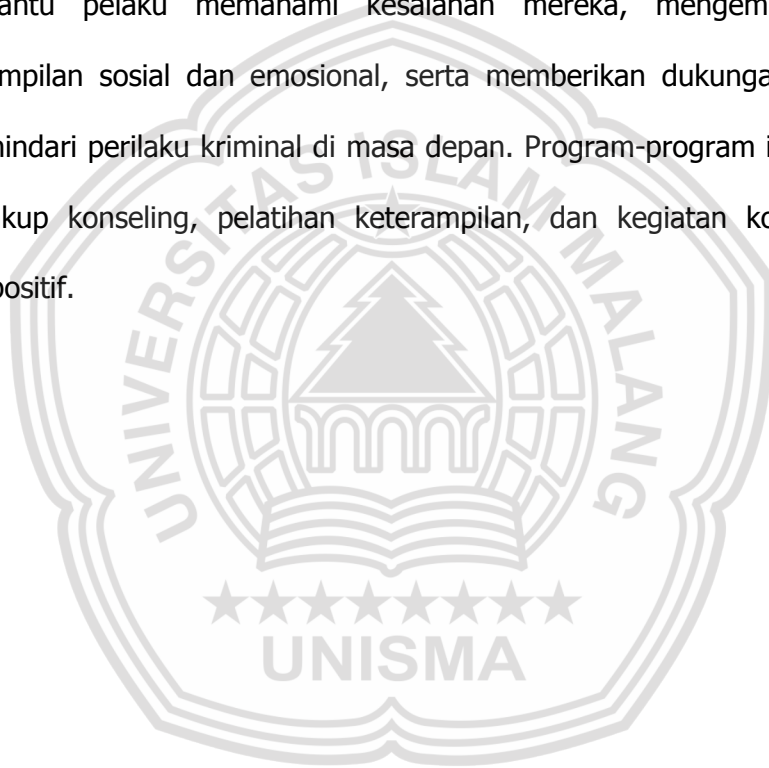
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan pertimbangan, diantaranya:

1. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai regulasi kepemilikan senjata. Hal ini dapat membantu mencegah pelanggaran hukum karena ketidaktahuan. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk mengadakan kampanye penyuluhan yang efektif berkesinambungan mengenai bahaya kepemilikan senjata tanpa izin serta konsekuensi

hukumnya. Edukasi juga bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, dan program pelatihan di berbagai komunitas.

2. Perlunya pengembangan program rehabilitasi bagi pelaku yang menunjukkan penyesalan dan sikap kooperatif selama proses hukum. Program ini dapat diintegrasikan dengan prinsip keadilan restoratif, yang tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga mendukung reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat. Rehabilitasi bertujuan untuk membantu pelaku memahami kesalahan mereka, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta memberikan dukungan untuk menghindari perilaku kriminal di masa depan. Program-program ini dapat mencakup konseling, pelatihan keterampilan, dan kegiatan komunitas yang positif.



DAFTAR PUSTAKA

- Astrid Teta Putri Wiyono, dan Wiwin Yulianingsih, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 1393/Pdt. G/2022/Pn. Sby Berkenaan Dengan Perjanjian Utang Piutang Dengan Objek Saham Sebagai Jaminan*. Kabillah: Journal of Social Community, 9(1), 2024. 322.
- Fawaid, Fikri. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 774 K/Pid.Sus/2015 dan 314 K/Pid./2015)*. Skripsi. Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Faisal, Andi. *Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks.)*, Skripsi, Universitas Bosowa, 2020
- Habibul Umam Taquiuddin, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 1(2), 2019. h. 192.
- HAK. Moch Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1989.
- Hardianti. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks)*, Skripsi, Universitas Bosowa, 2021.
- Hamsu Abdul Gani, dan Andika Wahyudi Gani, *Analisis Yuridis Terhadap Pandemi Covid-19 Sebagai Kategori Overmacht Dalam Melakukan Restrukturisasi Perjanjian Kredit. Prosiding Penguatan Riset, Inovasi, Dan Kreativitas Peneliti Di Era Pandemi Covid-19*, 7(13), 2021: 2012-2024.

- I Made Pasak. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta; Kencana, 2016.
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam 18.2
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cet I Jakarta; Sinar Grafika, 2014.
- Lilik Mulyadi. *Putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia: teori, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2009.
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Missleini, dan Evi Retno Wulan, *The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K/PID2-23*. Jurnal Hukum Sehasen, 10(1), 2024. h. 187.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012.
- Moh Saefulloh Ponco Eko, M. Muhibbin, dan Suratman Suratman, *Ratio Decidendi in the Decision of State Administrative Case No. 160/G/2018/PTUN. SBY. International Journal of Social Service and Research*, 4(5), 2024.
- Munthe, Timbul Lias Ate, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Serta Kepemilikan Senjata Api Oleh Warga Sipil (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus/2020/Pn Jap)*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2021.

- Pandu, Dewanto, *Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. Jurnal Ius Constituendum*, 5(2). 2020. h. 320
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenanda Media Group, 2014.
- Ramdani, Wahyu Sururie. *Putusan Pengadilan*, Bandung; Mimbar Pustaka, 2023.
- Rubini dan Chaidir Ali. 1974, *Pengantar hukum acara perdata*, Alumni, 1974.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Kencana, 2016.
- Soerjano, Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudikno, Mertokusumo. *Hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, 2009.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta, 2015.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet V, Jakarta; Sinar Grafika, 2017.
- Theodorus Steven Sitanggang, *Penerapan Doktrin Stare Decisis Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Diss. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, 2022.

